

BAB III

METODE PENELITIAN

Pada bagian ini akan diuraikan metode penelitian yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan dan menganalisis data kaitannya dengan kebijakan pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat di Jawa Barat. Penjelasan sebagaimana dimaksud meliputi; desain penelitian, partisipan dan tempat penelitian, metode penelitian, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik sampling, dan isu etik. Objek penelitian ini adalah kebijakan pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat di Jawa Barat.

3.1. Desain Penelitian

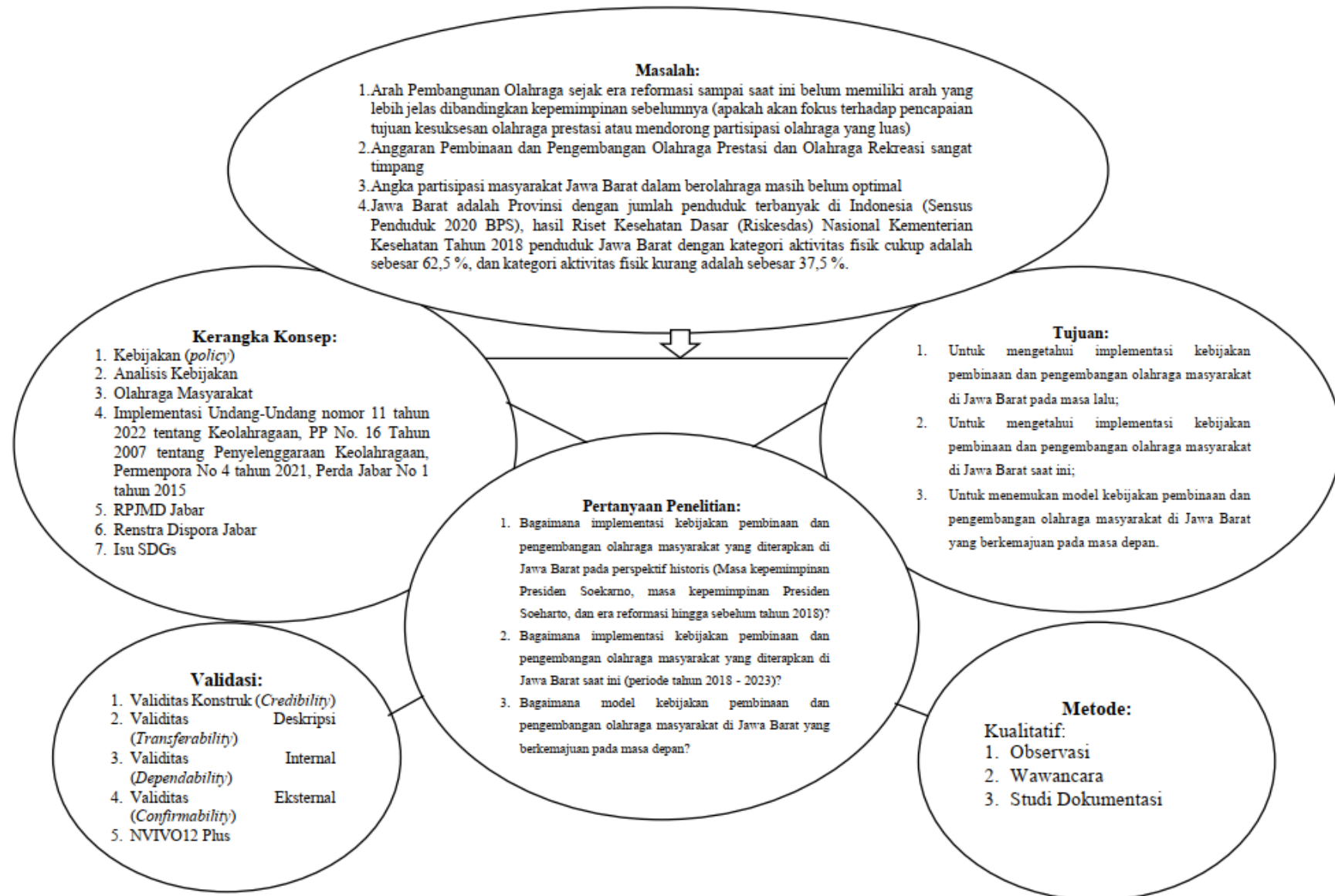
Pada penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif (*qualitative research*) dengan desain studi kasus (Edwards & Skinner, 2009), yang dimaksud *qualitative research* adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara-cara lain dalam koridor kuantifikasi (pengukuran). Hal ini sejalan dengan pendapat (Taylor, S. J., Bogdan, R., & DeVault, 2015) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut (Moh. Nazir, 2014) penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang dengan tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif karena mengkaji kebijakan pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat yang sudah diimplementasikan dengan studi kasus di Provinsi Jawa Barat. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif memungkinkan untuk memahami dan memfokuskan pada gejala dan fakta realitas yang terjadi pada implementasi kebijakan pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat di Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif studi kasus karena mengkaji suatu kebijakan yang sudah

diimplementasikan di Provinsi Jawa Barat.

Untuk selanjutnya menjadi pondasi dalam mengkonstruksi kebijakan pembangunan dan pengembangan olahraga masyarakat yang ideal dalam konsep berkemajuan serta diproyeksikan mengarah pada paradigma “pembangunan melalui olahraga”. Kemudian menurut (Creswell, 2009) bahwa penelitian kualitatif sebagai suatu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif. Selain itu, hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Pernyataan tersebut menyiratkan bahwa pendekatan kualitatif merupakan suatu pendekatan yang menekankan pada kajian interpretatif data hasil penelitian dan tidak menggunakan kuantifikasi atau perhitungan statistik. Karena itu, penelitian kualitatif seringkali disebut sebagai penelitian naturalistik sebab karakteristik pokok yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah kepedulian terhadap “makna”. Kemudian penelitian ini pun memiliki karakteristik *flexible design* serta circular, hal ini berarti pula bahwa saat melakukan pengambilan data tidak dilakukan satu kali pengambilan data, melainkan berkali-kali hingga menemukan kemandegan data atau persamaan makna data yang didapatkan dari mulai informan yang berasal dari pemangku kebijakan hingga informan yang berasal dari pengguna atau yang terdampak pada kebijakan yang diterapkan.

Setiap tujuan yang ingin dicapai, dipastikan ada kerangka konsep yang berguna sebagai logika berpikir peneliti. Untuk mencapai tujuan penelitian juga diperlukan alat dan cara (metode). Langkah terakhir dalam cetak biru yaitu, ancaman internal dan eksternal terhadap validitas penelitian harus menjadi bahan pertimbangan seorang peneliti. Lebih lengkapnya dapat dilihat pada Gambar 3.1. berikut:



Gambar 3.1. *Blueprint* (Cetakbiru) Penelitian Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Masyarakat yang Berkemajuan di Jawa Barat: Perspektif Historis dan Model Kebijakan Masa Depan

Adapun dasar pertimbangan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif ini dipilih antara lain karena:

- 1) Jenis pendekatan tersebut dianggap lebih cocok untuk mengungkap secara tajam dan mendalam terkait pertanyaan bagaimana kebijakan diimplementasikan. Pendekatan ini berusaha mengungkap pandangan, sikap dan pengalaman informan dan instrumen yang langsung terlibat dalam proses implementasi.
- 2) Metode ini dianggap lebih mampu memberikan hasil penelitian yang bersifat konstruk dan kontekstual sehingga dapat dijadikan landasan instrumen untuk menyusun suatu konsep baru yang lebih akurat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, membuat peneliti semakin yakin menggunakan desain penelitian kualitatif dengan maksud agar hasil yang diperoleh dapat menjawab secara utuh dan menyeluruh aspek-aspek yang diteliti. Selain itu, desain penelitian kualitatif dapat menghindari terjadinya bias dalam penelitian karena peneliti lebih leluasa melakukan pengamatan. Senada dengan (Huberman & Miles, 2012) yang mengemukakan bahwa “dengan data kualitatif kita dapat mengikuti dan memahami alur peristiwa secara kronologis, menilai sebab-akibat dalam lingkup pikiran orang-orang setempat, dan memperoleh penjelasan yang banyak dan bermanfaat”. Melalui pendekatan ini, diharapkan peneliti dapat melakukan kajian secara komprehensif berkaitan dengan masalah penelitian (Lexy J. Moleong, 2019).

3.2. Informan dan Tempat Penelitian

Subyek atau informan kunci dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat langsung terhadap implementasi kebijakan pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat di Jawa Barat. Dalam penelitian ini akan fokus pada lingkup daerah/provinsi Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. Hal ini menjadi dasar pandangan bahwa dari bidang sumber daya manusia (masyarakat), Provinsi Jawa Barat memiliki potensi terbesar dari di Indonesia. Disamping itu, Jawa Barat memiliki Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) dengan skor 3,64 yang melebihi skor nasional yaitu 3,26. Salah satu indikator dalam penilaian indeks ini adalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing tinggi. Hal ini tentunya menjadi dasar bahwa Jawa Barat memiliki SDM yang

unggul. Disamping itu, hal yang menjadi unik pada penelitian pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat di Jawa Barat ialah dengan kondisi aktualnya sebagai Provinsi yang memiliki anggaran olahraga dengan nominal terbesar di Indonesia yaitu 409 Miliar, namun pada lingkup pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat khususnya pada aspek tingkat partisipasi masyarakat dalam berolahraga, Provinsi Jawa Barat menempati posisi kedua terbawah dari 34 Provinsi, tentunya hal ini menjadi kondisi yang sangat prihatin. Maka dari itu, berdasarkan hal tersebut menjadi pertimbangan penelitian studi kasus ini dilaksanakan di Jawa Barat.

Adapun cara penentuan informan dilakukan melalui teknik informan yang memenuhi syarat *reach cases*, selain memahami juga terlibat atau pernah mengalami sendiri. Secara umum informan adalah orang-orang yang dijadikan sebagai sumber untuk memperoleh informasi tentang situasi dan kondisi dasar penelitian, sehingga jumlah informan ini bisa sangat banyak dan berkembang sesuai kebutuhan penelitian. Berbeda dengan informan kunci yang relatif terbatas jumlah dan kemungkinan perkembangannya dibandingkan dengan informan pada umumnya. Sementara itu *key informan* adalah orang yang memberikan data sesuai dengan kedudukan dan posisi, serta tugas pokok dan fungsi atau jabatannya masing-masing. Kedudukan *key informan* sangat penting untuk menjangkau informasi selengkap mungkin dari berbagai macam sumber. Hal ini terkait peran dan kedudukan *key informan* yang telah diwawancarai itu dipandang kompeten dan relevan serta dapat mengungkapkan berbagai masalah yang dijadikan objek penelitian ini.

Untuk mendukung keberhasilan penelitian mengenai implementasi kebijakan pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat di Jawa Barat, subjek dalam penelitian ini tidak statis, artinya dapat berubah dalam perjalanan (*snowball sampling*), karena dalam penelitian kualitatif tidak dikenal subjek yang ditentukan berdasarkan penghitungan secara kuantitatif, akan tetapi lebih kepada hal apa yang ingin dikaji peneliti. Karena itu dalam penelitian ini teknik sampling yang digunakan adalah subjek bertujuan (*purposive sampling*), yakni pihak-pihak yang dianggap dapat memberikan informasi berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai (Nasution, 2013).

Penentuan informan penelitian mengacu pada masukan unsur-unsur narasumber atau informan kunci. Informan itu merupakan pihak-pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dengan proses implementasi kebijakan. Mereka-mereka itu, baik yang berasal dari unsur pemerintah, masyarakat yang aktif dalam organisasi olahraga di Jawa Barat, dan masyarakat yang menjadi instruktur atau pemandu olahraga masyarakat. Dasar pertimbangan informan tersebut dipilih berdasarkan sejumlah kriteria dan pertimbangan bahwa informan tersebut merupakan para pihak yang melihat, merasakan dan mengalami secara langsung bagaimana kebijakan pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat diimplementasikan di Jawa Barat.

3.2.1. Karakteristik Informan

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, peneliti secara spesifik menentukan kriteria kelayakan informan untuk penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Birokrat atau dalam hal ini Kepala dan/atau staf Dinas Pemuda dan Olahraga Jawa Barat dan Kabupaten/Kota di Jawa Barat, yang relevan dengan penerapan kebijakan pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat di Jawa Barat.
- 2) Ketua dan/atau Pengurus KORMI Jabar & Kabupaten/Kota, sebagai organisasi mitra pemerintah yang melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat di Jawa Barat.
- 3) Instruktur/Pemandu Olahraga Masyarakat yang memiliki kualifikasi dan kompetensi dan memimpin langsung kegiatan olahraga masyarakat di Kabupaten/Kota Jawa Barat.
- 4) Pakar ahli dalam kebijakan olahraga yang saat ini berprofesi sebagai akademisi (Guru Besar), sekaligus mantan kepala dinas pemuda dan olahraga Provinsi Jawa Barat.
- 5) Informan perspektif historis yang merupakan pelaku yang mengalami perjalanan pelaksanaan olahraga masyarakat pada era kepemimpinan Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto serta memiliki latar belakang pekerjaan yang memiliki hubungan dengan bidang keolahragaan.

Jumlah dan unsur informan penelitian serta kodefikasi dari masing-masing informan ditentukan menurut sejumlah kriteria yang dirancang sebelum

penelitian dilakukan. Adapun jumlah, unsur dan kodefikasi dari masing-masing informan penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1. Kodefikasi Informan

| No | Unsur Informan | Kode | Jumlah | Keterangan |
|----|--|--|--------|------------|
| 1 | Kepala dan/atau staf Dinas Pemuda dan Olahraga Jawa Barat | DO 5 AS DO 6 AP | 2 | Narasumber |
| 2 | Kepala dan/atau staf Dinas Pemuda dan Olahraga Kab/Kota di-Jabar | DO 1 GR DO 2 ST DO 3 KR DO 4 AJ | 4 | Narasumber |
| 3 | Ketua dan/atau Pengurus KORMI Jabar & Kabupaten/Kota | KO 1 IW KO 2 DR KO 3 RL KO 4 MIN KO 5 DA | 5 | Narasumber |
| 4 | Instruktur / Pemandu Olahraga Masyarakat | IN 1 TH IN 2 RM IN 3 ES IN 4 EV | 4 | Narasumber |
| 5 | Pakar Ahli | PA1-AM PA2-YMS | 2 | Narasumber |
| 6 | Informan Perspektif Historis | OL-AM OB-SS | 2 | Narasumber |

Pada dasarnya informan dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu informan kunci dan informan pendukung. Sedangkan jumlah informan pendukung tidak dibatasi karena disesuaikan dengan kebutuhan data yang diperlukan dalam penelitian ini. Selanjutnya, untuk mengetahui dan memahami lebih mendalam terhadap kebijakan yang diteliti digunakan metode pemahaman secara deskriptif. Sedangkan, untuk menentukan sumber data penelitian dan

informan dalam penelitian kualitatif ini akan digunakan cara/teknik penguliran (*snowball*) dengan melakukan triangulasi sumber.

Pemilihan subjek penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang mendalam mengenai penerapan kebijakan olahraga yang diterapkan di Jawa Barat pada saat periode kepemimpinannya. Hal ini sejalan dengan pandangan Prof. Rozaini Nasution (2003), bahwa subjek penelitian merupakan sumber yang dapat memberikan informasi, dipilih secara *purposive* dan bertalian dengan purpose atau tujuan tertentu. Maka hasil temuan yang diperoleh dari subjek penelitian dapat dijadikan rujukan dalam menemukenali implementasi kebijakan pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat sebagai dasar dari penerapan kebijakan olahraga yang diterapkan di Jawa Barat.

3.2.2. Tempat Penelitian

Tempat pelaksanaan penelitian dilaksanakan di wilayah Provinsi Jawa Barat, dan dilaksanakan pada tahun 2022, dimana secara administratif saat ini Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat berjumlah 27 Kabupaten/Kota terdiri atas 18 Kabupaten dan 9 Kota dengan 625 kecamatan dan 5.877 desa/kelurahan yang terbagi pada 4 wilayah administratif. Selanjutnya sebagai representatif dari masing-masing wilayah administratif tersebut dan disesuaikan dengan keterjangkauan peneliti, maka ditentukan perwakilan berdasarkan raihian hasil pengukuran angka partisipasi masyarakat berolahraga (APMO) tahun 2021 yang paling tinggi di wilayahnya. Wilayah I diwakili oleh Kota Sukabumi, wilayah II diwakili oleh Kabupaten Karawang, wilayah III diwakili oleh Kabupaten Indramayu, dan wilayah IV diwakili oleh Kabupaten Bandung.

3.3. Instrumen Penelitian

Untuk memandu jalannya pelaksanaan penelitian, peneliti membuat sejumlah kisi-kisi dan pedoman yang disusun berdasarkan masalah penelitian, substansi, aspek yang diamati, dan indikator, panduan yang digunakan (wawancara, studi dokumentasi dan observasi lapangan), dan sumber.

Meskipun dalam penelitian kualitatif, instrumen penelitian merupakan peneliti sendiri. Artinya, peneliti bebas menginterpretasikan hal-hal yang diperoleh berdasarkan hasil, wawancara dan studi dokumentasi. Penelitian kualitatif sebagaimana telah dijelaskan lebih memperhatikan proses daripada hasil, ini berarti

bahwa aspek penting dalam penelitian kualitatif adalah pemahaman akan makna dari suatu kejadian atau berbagai interaksi dalam situasi yang wajar. Karena itu, instrumen yang digunakan bukanlah kuesioner atau tes, melainkan peneliti (Sugiyono, 2016).

Guna memandu jalannya penelitian, instrumen pendukung yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan pedoman wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Penggunaan instrumen penelitian ini tentunya penting, karena dinilai sebagai pemandu dalam pelaksanaan jalannya penelitian. Peneliti juga menentukan kisi-kisi instrumen penelitian sebagai pemandu jalan penelitian agar lebih terarah pada konteks permasalahan penelitian khususnya mengenai sistem pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat yang didasarkan pada segala aspek terkait kebijakan pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat yang tercantum pada Undang-undang keolahragaan dan Perda Jawa Barat Nomor 1 tahun 2015 tentang penyelenggaraan keolahragaan sebagai dasar hukum dalam menentukan kebijakan yang diterapkan, serta pada teori yang relevan dengan pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat. Berikut merupakan kisi-kisi instrumen dalam penelitian ini yang disajikan dalam tabel 3.2. berikut:

Tabel 3.2
Kisi-kisi Instrumen Penelitian Analisis Kebijakan Sistem Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Masyarakat di Jawa Barat

| No | Variabel Konsep | Landasan Yuridis | Substansi | Aspek yang diamati | Indikator | Teknik Instrumen | Responden / Sumber |
|----|--|---|--|---|---|-------------------|--|
| 1. | Implementasi Kebijakan pembinaan dan pengembangan olahraga Masyarakat pada perspektif historis | <ul style="list-style-type: none"> - UU no.4 tahun 1950, - KepPres RI No. 131 tahun 1962 | a. Olahraga Masyarakat Orde Lama (1945 – 1967) | Pelaksanaan olahraga yang berlandaskan pada undang-undang/aturan/Kebijakan Orde Lama | <ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya olahraga secara teratur di sekolah. - Olahraga meliputi segala kegiatan atau usaha untuk mendorong, membangkitkan, mengembangkan, dan membina kekuatan-kekuatan jasmaniah maupun rohaniyah pada tiap manusia | Studi Dokumentasi | <ul style="list-style-type: none"> - UU no.4 tahun 1950, - KepPres RI No. 131 tahun 1962 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Surat Keputusan Ditjen Olahraga dan Pemuda nomor 39/V/1974 tanggal 3 Mei 1974 | b. Olahraga Masyarakat Orde Baru (1967-1998) | Pelaksanaan olahraga masyarakat yang berlandaskan pada undang-undang/aturan/Kebijakan Orde Baru | <ul style="list-style-type: none"> - Mengubah SMOA menjadi Sekolah Guru Keolahragaan (SGK), dengan maksud agar lulusannya diakui memiliki kemampuan untuk menjadi guru olahraga di sekolah, dan juga untuk menjadi pembina olahraga di masyarakat. - Praktek pendidikan jasmani dan olahraga adalah hak dasar bagi semua orang - Penetapan jam Krida Olahraga - Panji Olahraga Nasional : Memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan Masyarakat | Studi Dokumentasi | <ul style="list-style-type: none"> - Surat Keputusan Ditjen Olahraga dan Pemuda nomor 39/V/1974 tanggal 3 Mei 1974 - UNESCO Charter 1978 - KepPres RI No 17 Tahun 1984 - KepPres RI No 67 Tahun 1985 |

| No | Variabel Konsep | Landasan Yuridis | Substansi | Aspek yang diamati | Indikator | Teknik Instrumen | Responden / Sumber |
|----|---|---|---|---|--|--|---|
| | | - UU SKN - PP 16 2007 | c. Olahraga Masyarakat Era Reformasi (1998-sekarang) | Pelaksanaan olahraga masyarakat yang berlandaskan undang-undang/aturan/Kebijakan Era Reformasi sampai dengan sebelum Tahun 2018 | - Bertujuan untuk mengembangkan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kesehatan, kebugaran, kesenangan, dan hubungan sosial, - Diarahkan untuk menggali, mengembangkan, melestarikan, serta memanfaatkan olahraga tradisional yang tumbuh dan berkembang sebagai budaya dalam masyarakat. | Studi Dokumentasi | - UU SKN - PP 16 2007 |
| | | - Perda Jabar no. 24 tahun 2010 - Perda Jabar No. 2 tahun 2009 | d. Kebijakan Olahraga Masyarakat Jawa Barat Periode 2008 - 2013 | Pelaksanaan olahraga masyarakat yang berlandaskan pada RPJMD Jabar, Renstra Dispora Jabar | - Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang sehat jasmani dan rohani melalui olahraga - Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berolahraga. | Studi Dokumentasi | - RPJMD Jabar - Renstra, Dispora Jabar Periode 2008 - 2013 |
| | | - Perda Jabar no. 24 tahun 2010 - Perda Jabar No. 8 tahun 2017 | e. Kebijakan Olahraga Masyarakat Jawa Barat Periode 2013 – 2018 | Pelaksanaan olahraga masyarakat yang berlandaskan pada RPJMD Jabar, Renstra Dispora Jabar | - Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana olahraga dengan arah kebijakan pendukung pembangunan gelanggang olahraga di kota/kabupaten. - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berolahraga. | Studi Dokumentasi | - RPJMD Jabar - Renstra Dispora Jabar Periode 2013 - 2018 |
| 2. | Kebijakan pembinaan dan pengembangan olahraga Masyarakat yang diterapkan di | - UU Keolahragaan Pasal 19 ayat 1 - Perda 1 2015 Pasal 29 ayat | a. Pelaksanaan olahraga masyarakat | Program/kegiatan olahraga masyarakat | Dilaksanakan oleh Lembaga/perkumpulan/organisasi olahraga dan perangkat daerah provinsi | Studi Dokumentasi, Observasi dan wawancara | - Dispora Jabar - Dispora Kab/Kota - KORMI Jabar & Kab/Kota - Instruktur/Pemandu olahraga masyarakat |

| No | Variabel Konsep | Landasan Yuridis | Substansi | Aspek yang diamati | Indikator | Teknik Instrumen | Responden / Sumber |
|----|---------------------|---|--|--|--|------------------------------|--|
| | Jawa Barat saat ini | 1, Pasal 30, Pasal 32 ayat 3 | | | | | |
| | | - UU Keolahragaan Pasal 19 ayat 2 - PP 16 2007 Pasal 30 ayat 1 - Permenpora 4 2021 Pasal 4 huruf a - Perda 1 2015 Pasal 28 | b. Tujuan olahraga masyarakat | Tujuan pelaksanaan olahraga masyarakat | Aktivitas fisik, menumbuhkan kegembiraan, mempertahankan, memulihkan, dan meningkatkan kesehatan serta kebugaran tubuh, membangun hubungan sosial, melestarikan dan meningkatkan kekayaan budaya daerah dan nasional, mempererat interaksi sosial yang kondusif dan memperkuat ketahanan nasional, meningkatkan produktivitas ekonomi nasional | Studi Dokumentasi, Wawancara | - Dispora Jabar - Dispora Kab/Kota - KORMI Jabar & Kab/Kota/ - Instruktur/Pemandu olahraga masyarakat |
| | | UU Keolahragaan Pasal 19 ayat 4 (a) & 5 | c. Aturan main pelaksanaan olahraga masyarakat | Prosedur dan syarat | Ketersediaan prosedur dan syarat dari organisasi olahraga masyarakat | Studi Dokumentasi, Wawancara | - Dispora Jabar - Dispora Kab/Kota - KORMI Jabar & Kab/Kota/ - Instruktur/Pemandu olahraga masyarakat |
| | | - UU Keolahragaan | d. Instruktur/Pemandu olahraga masyarakat | Sertifikasi Lisensi | - Penyelenggaraan kegiatan olahraga masyarakat dipimpin oleh instruktur/pemandu yang bersertifikat/lisensi | Studi Dokumentasi Wawancara | - Dispora Jabar - Dispora Kab/Kota - KORMI Jabar & Kab/Kota |

| No | Variabel Konsep | Landasan Yuridis | Substansi | Aspek yang diamati | Indikator | Teknik Instrumen | Responden / Sumber |
|----|-----------------|--|---|---|---|---|--|
| | | Pasal 19 ayat 4 (b) - PP 16 2007 Pasal 31 ayat 2 huruf a - Perda 1 2015 Pasal 29 ayat 4, Pasal 31 | | | - Pelaksanaan Sertifikasi Lisensi bagi instruktur/pemandu olahraga masyarakat oleh pemerintah dan organisasi olahraga masyarakat. | | - Instruktur/Pemandu olahraga masyarakat |
| | | - UU Keolahragaan Pasal 27 ayat 3 - PP 16 2007 Pasal 32 ayat 1 - Permenpora 4 2021 Pasal 5 huruf a, Pasal 7 huruf c - Perda 1 2015 Pasal 29 ayat 2 huruf a, Pasal 32 ayat 2 huruf a | e. Prasarana dan sarana olahraga masyarakat | Ketersediaan prasarana dan sarana olahraga masyarakat | Memadai serta sesuai standar fungsi dan keselamatan | Studi Dokumentasi Observasi dan wawancara | - Dispora Jabar - Dispora Kab/Kota - KORMI Jabar & Kab/Kota/ - Instruktur/Pemandu olahraga masyarakat |

| No | Variabel Konsep | Landasan Yuridis | Substansi | Aspek yang diamati | Indikator | Teknik Instrumen | Responden / Sumber |
|----|-----------------|--|--|---|--|---|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - UU Keolahragaan Pasal 27 ayat 5 - Permenpora 4 2021 Pasal 5 huruf b | f. Prinsip pelaksanaan | Program/kegiatan olahraga masyarakat | Dilaksanakan dengan prinsip 5 M (mudah, murah, menarik, manfaat, dan massal) | Studi Dokumentasi Observasi dan wawancara | <ul style="list-style-type: none"> - Dispora Jabar - Dispora Kab/Kota - KORMI Jabar & Kab/Kota/ - Instruktur/Pemandu olahraga masyarakat |
| | | <ul style="list-style-type: none"> - UU Keolahragaan Pasal 27 ayat 6 - PP 16 2007 Pasal 32 ayat 2, 3 dan 4 - Permenpora 4 2021 Pasal 11 huruf a, b, dan d - Perda 1 2015 Pasal 32 ayat 2 huruf e | g. Sentra, Sanggar-sanggar, Perkumpulan dan Festival | Ketersediaan sentra, sanggar-sanggar dan perkumpulan olahraga Masyarakat dan pelaksanaan festival olahraga masyarakat | Menumbuhkembangkan sentra, sanggar-sanggar dan mengaktifkan perkumpulan olahraga dalam masyarakat, serta menyelenggarakan festival olahraga masyarakat yang berjenjang dan berkelanjutan | Studi Dokumentasi Observasi dan wawancara | <ul style="list-style-type: none"> - Dispora Jabar - Dispora Kab/Kota - KORMI Jabar & Kab/Kota/ - Instruktur/Pemandu olahraga masyarakat |
| | | <ul style="list-style-type: none"> - UU Keolahragaan Pasal 75 ayat 1, 2 dan Pasal 77 ayat 1 - Permenpora 4 2021 Pasal 5 huruf c | h. Pendanaan | Pendanaan bagi pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat | - Berkecukupan dan berkelanjutan | Studi Dokumentasi dan wawancara | <ul style="list-style-type: none"> - Dispora Jabar - Dispora Kab/Kota - KORMI Jabar & Kab/Kota |

| No | Variabel Konsep | Landasan Yuridis | Substansi | Aspek yang diamati | Indikator | Teknik Instrumen | Responden / Sumber |
|----|--|---|---|--|--|-----------------------------|--|
| | | Perda 1 2015 Pasal 32 ayat 1, 2 dan 3 | i. Fasilitasi | Fasilitasi kepada induk organisasi olahraga masyarakat | Bentuk Fasilitasi kepada induk organisasi olahraga masyarakat | Studi Dokumentasi Wawancara | - Dispora Jabar - Dispora Kab/Kota - KORMI Jabar |
| | | Perda 1 2015 Pasal 33 | j. Kerjasama | Kerjasama antar Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota | Kerjasama dalam Menggali, mengembangkan, melestarikan, dan memanfaatkan olahraga masyarakat yang tumbuh dan berkembang sebagai khasanah budaya Daerah Provinsi | Studi Dokumentasi Wawancara | - Dispora Jabar - Dispora Kab/Kota |
| | | - Perda Jabar no. 24 tahun 2010 - Perda Jabar No. 8 tahun 2021 | k. Kebijakan Olahraga Masyarakat Jawa Barat Periode 2018 – 2023 | Pelaksanaan olahraga masyarakat yang berlandaskan pada RPJMD, Renstra, Program tahunan Dispora Jabar | - Menumbuhkan budaya bergerak dan berolahraga di masyarakat - Angka Partisipasi Masyarakat Berolahraga | Studi Dokumentasi | - RPJPD 2005-2025 - Perda Jabar No 1 tahun 2015 - RPJMD 2018 - 2023 - Renstra Dispora Jabar Periode 2018 - 2023 |
| 3. | Model kebijakan pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat di Jawa Barat yang berkembang pada masa depan | Konsep Local Sports Council (LSC) (Misener et al., 2013) | a. Mekanisme pengembangan olahraga masyarakat | Peran dewan olahraga lokal yang mandatnya mencerminkan <i>'sport for all'</i> | Mempromosikan, mengembangkan, dan mengkoordinasikan peluang untuk olahraga masyarakat di masyarakat | Studi Dokumentasi Wawancara | - Artikel Ilmiah terkait pengembangan olahraga masyarakat yang ideal - Pakar ahli |
| | | Konsep Delivery networks and community sport in England (Harris & Houlihan, 2014) | b. Sistem penyampaian kebijakan olahraga masyarakat | Berbagai faktor eksogen yang mempengaruhi interaksi dalam proses kebijakan olahraga masyarakat dari perspektif otoritas lokal. | Penyampaian kebijakan olahraga masyarakat melalui organisasi/Lembaga olahraga masyarakat | Studi Dokumentasi | Artikel Ilmiah serta Buku terkait kebijakan dan organisasi olahraga masyarakat yang ideal |

Dari kisi-kisi instrumen (Tabel 3.2.) diatas, peneliti merancang pedoman dalam pengumpulan data berupa pedoman studi dokumentasi, pedoman observasi, dan pedoman wawancara. Pedoman yang dirancang merupakan penerjemahan dari setiap substansi yang ada di kisi-kisi instrumen tersebut. Berikut pedoman-pedoman yang sudah dirancang:

Tabel 3.3. Pedoman Studi Dokumentasi
Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Masyarakat di Jawa Barat

| No | Variabel Konsep | Objek Telaah | Temuan |
|----|---|--|--------|
| 1 | Realita kebijakan pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat yang diterapkan di Jawa Barat pada perspektif historis (Rumusan Masalah 1) | Dokumen UU no.4 tahun 1950, KepPres RI No. 131 tahun 1962 | |
| | | Dokumen GBHN, KepPres RI No 17 Tahun 1984, KepPres RI No 67 Tahun 1985 | |
| | | Dokumen UU No 3 2005, PP 16 2007 | |
| | | Dokumen RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Jawa Barat, Renstra dan Program Tahunan Dispora Jabar Periode Tahun 2008 - 2013 dan 2013 - 2018 | |
| 2 | Realita kebijakan pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat yang diterapkan di Jawa Barat saat ini (Rumusan Masalah 2) | Dokumen Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Masyarakat (UU Keolahragaan, PP 16 2007, Permenpora 4 2021, Perda 1 2015) | |
| | | Dokumen RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Jawa Barat, Renstra dan Program Tahunan Dispora Jabar Periode Tahun 2018 - 2023 | |
| 3 | Model kebijakan pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat di Jawa Barat yang berkemajuan di masa depan (Rumusan Masalah 3) | Dokumen Konsep <i>Local Sports Council</i> (LSC) (Misener et al., 2013) dan Dokumen Konsep <i>Delivery networks and community sport in England</i> (Harris & Houlihan, 2014) | |

Table 3.4. Pedoman Observasi
Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Masyarakat di Jawa Barat

| No | Variabel Konsep | Objek Telaah | Temuan |
|----|---|--|--------|
| 1. | Realita kebijakan pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat yang diterapkan di Jawa Barat saat ini (Rumusan Masalah 2) | Pelaksanaan Pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah/Perangkat Daerah, Lembaga, perkumpulan atau organisasi olahraga | |
| | | Ketersediaan prasarana dan sarana olahraga masyarakat yang memadai | |
| | | Pelaksanaan olahraga masyarakat dengan prinsip 5 M (mudah, murah, menarik, manfaat, dan massal) | |
| | | Menumbuhkembangkan sanggar-sanggar dan mengaktifkan perkumpulan olahraga dalam masyarakat, serta menyelenggarakan festival olahraga masyarakat yang berjenjang dan berkelanjutan | |

Pedoman Wawancara

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Masyarakat yang Berkemajuan di Jawa Barat : Perspektif Historis dan Model Kebijakan Masa Depan

Berikut adalah beberapa pertanyaan yang diajukan pada narasumber untuk menjawab Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan olahraga masyarakat yang diterapkan di Jawa Barat saat ini:

- 1) Apakah Pemerintah/Perangkat Daerah/Induk Organisasi melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat ? **(2a)**
- 2) Bagaimana peran Pemerintah/Perangkat Daerah/Induk organisasi/Perkumpulan/Lembaga olahraga masyarakat dalam pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat di Jawa Barat? **(2a)**

- 3) Apakah pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat dilaksanakan dengan salah satu tujuannya untuk membudayakan aktivitas fisik, menumbuhkan kegembiraan, mempertahankan, memulihkan, dan meningkatkan kesehatan serta kebugaran tubuh, membangun hubungan sosial, melestarikan dan meningkatkan kekayaan budaya daerah dan nasional, mempererat interaksi sosial yang kondusif dan memperkuat ketahanan nasional, meningkatkan produktivitas ekonomi nasional? **(2b)**
- 4) Apakah terdapat prosedur dan syarat olahraga masyarakat yang dikeluarkan oleh organisasi terkait? Apakah sudah berjalan dengan baik? **(2c)**
- 5) Apakah pada setiap penyelenggaraan kegiatan olahraga masyarakat selalu dipimpin oleh instruktur/pemandu yang memiliki sertifikat/lisensi sesuai dengan cabang olahraganya ? **(2d)**
- 6) Apakah pemerintah/organisasi olahraga masyarakat mengakomodir instruktur/pemandu untuk mendapatkan kualifikasi yang dibutuhkan dengan adanya sertifikasi lisensi sesuai dengan cabang olahraganya? **(2d)**
- 7) Apakah sudah tersedia prasarana dan sarana olahraga masyarakat yang memadai sesuai dengan standar fungsi dan keselamatan yang membuat masyarakat berolahraga dengan nyaman dan aman? **(2e)**
- 8) Apakah olahraga masyarakat yang dilaksanakan selama ini berprinsip pada 5M (mudah, murah, manfaat, menarik dan massal)? **(2f)**
- 9) Apakah telah dilaksanakan pembentukan sentra-sentra, sanggar-sanggar dan perkumpulan olahraga masyarakat di masyarakat? **(2g)**
- 10) Apakah sudah diselenggarakan festival olahraga masyarakat baik oleh pemerintah atau inisiatif dari masyarakat yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional hingga internasional? **(2g)**
- 11) Apakah dukungan pendanaan bagi pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat berkecukupan dan berkelanjutan? **(2h)**
- 12) Bagaimanakah bentuk fasilitasi yang diberikan oleh pemerintah kepada induk organisasi olahraga masyarakat? **(2i)**
- 13) Apakah terdapat Kerjasama antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam menggali, mengembangkan, melestarikan, dan memanfaatkan olahraga masyarakat yang tumbuh dan berkembang sebagai

khasanah budaya Daerah Provinsi ? jika ada, jelaskan kerjasama seperti apa?
(2j)

3.4. Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data penelitian, peneliti menggunakan teknik studi dokumentasi dan wawancara, sebagaimana dapat dilihat pada penjelasan berikut.

3.4.1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk menggali informasi, pemikiran, gagasan, sikap dan pengalaman narasumber (Moleong, 2017). Wawancara dalam penelitian ini ditujukan kepada informan kunci. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi argumentatif berkaitan dengan implementasi kebijakan pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat yang diterapkan di Jawa Barat.

Wawancara tatap muka dilakukan secara langsung antara peneliti dan narasumber secara dialogis, tanya jawab, diskusi dan melalui cara lain yang dapat memungkinkan diperolehnya informasi yang diperlukan sehingga memungkinkan diketahuinya hal-hal yang tidak tergal melalui studi dokumentasi (Creswell, 2012). Guna memberikan kemudahan dalam melakukan wawancara, maka dalam penelitian ini digunakan pedoman wawancara. Selain menggunakan pedoman wawancara, dalam penelitian ini juga menggunakan alat bantu wawancara berupa buku catatan yang berfungsi untuk mencatat semua percakapan dengan sumber data; dan *tape recorder* yang berfungsi untuk merekam pembicaraan pada saat wawancara.

Wawancara dilakukan melalui teknik wawancara mendalam semi terstruktur yang dimaksudkan untuk mencapai pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif terhadap data yang telah diperoleh. Dalam konteks wawancara mendalam, maka wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang secara sengaja dibuat berdasarkan kebutuhan data penelitian ini sebagaimana tergambar pada rumusan masalah. Isi dari pedoman wawancara yang digunakan selama penelitian berlangsung, kemudian berkembang di lapangan sesuai dengan dinamika kebutuhan data.

Adapun perencanaan wawancara dilakukan dengan menyusun Pedoman Wawancara yang berisi pokok - pokok pertanyaan terbuka. Pokok – pokok pertanyaan tersebut kemudian dikembangkan pada waktu dilakukan kegiatan wawancara. Pokok - pokok pertanyaan terbuka dan semi terstruktur itu antara lain sebagai berikut:

- 1) Pertanyaan - pertanyaan mengenai berbagai aspek terkait dengan proses penentuan dan pelaksanaan kebijakan olahraga yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat khususnya Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Jawa Barat. Pertanyaan yang diajukan kepada informan kunci ini antara lain terfokus pada bagaimana proses penetapan kebijakan olahraga itu dilakukan? Bagaimana teknis penerapannya? Apakah telah sesuai antara tujuan yang tercantum pada Perda dengan kebutuhan masyarakat? Bagaimana dukungan yang diberikan kepada organisasi olahraga masyarakat? bagaimana bentuk kerjasama dengan Pemerintah Kab/Kota? Bagaimana hasil yang diperoleh? Kemudian bagaimana pengawasan dilakukan pemerintah sebagai upaya untuk memastikan pelaksanaan kebijakan tersebut?
- 2) Pertanyaan - pertanyaan lain mengenai berbagai aspek terkait dengan peran dan fungsi induk organisasi olahraga masyarakat dalam pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat.
- 3) Pertanyaan - pertanyaan mengenai berbagai aspek terkait dengan kepuasan masyarakat terhadap layanan atau program yang diberikan oleh pemerintah dalam rangka pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat, apakah telah sesuai dengan yang mereka butuhkan atau tidak? Pertanyaan mengenai sikap dan perilaku aparat pelaksana kebijakan dan sebagainya. Apakah mereka sudah terbantu kesehatannya dengan berolahraga? Apakah yang harus dilakukan pemerintah dan juga masyarakat untuk meningkatkan kualitas implementasi kebijakan olahraga yang diterapkan? Dan sebagainya.
- 4) Pertanyaan - pertanyaan mengenai berbagai aspek terkait dengan Kerjasama yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kab/Kota dengan

Pemerintah Provinsi terkait pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat.

Wawancara pada penelitian ini ditujukan pada informan kunci yang terdiri dari unsur Pimpinan Dispora yang relevan sebagai pemangku kebijakan dalam sistem pemerintahan yang bertanggung jawab pada kebijakan pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota; Tim Pelaksana sistem pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat yang diwakili oleh Instruktur Olahraga Masyarakat, serta Ketua KORMI atau yang mewakili dari tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai pihak yang melaksanakan kebijakan olahraga masyarakat yang diterapkan; Para ahli yang diwakili oleh akademisi (Guru Besar) dalam bidang yang relevan dengan kebijakan pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat kajian bidang ilmu kebijakan dan pengembangan olahraga; serta informan kunci pada masa lampau.

Wawancara dilaksanakan secara tatap muka langsung maupun melalui dalam jaringan (daring), karena menyesuaikan dengan aktivitas dari para informan yang tidak selalu bisa ditemui secara tatap muka langsung. Sebelum proses wawancara peneliti meminta izin kepada informan untuk melakukan perekaman sebagai bentuk etika dalam proses pengumpulan data penelitian. Waktu yang dibutuhkan dalam proses wawancara kurang lebih sekitar 25 – 40 menit tergantung pada tingkat kerincian jawaban dari para informan tersebut. Setelah proses wawancara selesai, peneliti melakukan transkripsi wawancara sesuai dengan pertanyaan yang diajukan, termasuk jika ada pertanyaan pengembangan dan jawaban dari para informan. Kemudian dilakukan penafsiran data agar dapat dikemukakan antara data yang sudah dihasilkan. Dengan demikian, analisis data yang dihasilkan, sebagai narasi dalam deskripsi data dapat memberikan gambaran yang “lebih hidup” terkait dengan tema yang ditelaah dalam kajian penelitian ini (Ali, 2011).

Dengan model wawancara yang dilakukan secara mendalam yang semi terstruktur tersebut diharapkan dapat digali lebih dalam mengenai sejumlah informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Agar tercipta suasana yang

nyaman dan terbuka, maka wawancara dilakukan secara bebas dan terbuka, kecuali jika informan menghendaki model wawancara yang berbeda.

3.4.2. Observasi

Untuk memperoleh akurasi data yang lengkap dan jelas mengenai analisis kebijakan sistem pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat, peneliti mengikuti dan menyaksikan langsung pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat. Proses observasi yang dilakukan memfokuskan pada realitas-realitas yang nampak berkaitan dengan situasi dan kondisi pembinaan serta pengembangan olahraga masyarakat. Data observasi diharapkan lebih faktual tentang status dan kondisi kegiatan penelitian di wilayah tersebut, karena sebagaimana dijelaskan Cresswell (2008), data observasi memiliki beberapa keunggulan, antara lain:

- 1) Di lapangan, peneliti lebih mampu memahami konteks materi dalam situasi umum, memberinya pandangan yang komprehensif atau holistik.
- 2) Pengalaman langsung memungkinkan peneliti menggunakan pendekatan induktif, sehingga tidak dapat dipengaruhi oleh konsep atau pandangan sebelumnya. Pendekatan induktif membuka kemungkinan untuk membuat penemuan.
- 3) Peneliti dapat melihat hal-hal yang dilewatkan atau tidak diperhatikan oleh orang lain, terutama orang-orang yang berada di lingkungan tersebut karena dianggap “normal” sehingga tidak terungkap dalam wawancara.
- 4) Peneliti dapat menemukan hal-hal yang tidak akan diungkapkan oleh responden dalam wawancara karena sensitif atau ingin menyembunyikannya karena dapat merusak nama institusi.
- 5) Peneliti dapat menemukan hal-hal di luar pengamatan sumber, memberikan gambaran yang lebih lengkap kepada peneliti.
- 6) Kesan-kesan pribadi juga dinilai sebagai hasil dari pengamatan misalnya perasaan situasi sosial para informan.

Melalui teknik observasi atau pengamatan, maka peneliti dapat merasakan seutuhnya apa yang dirasakan oleh subjek penelitian. Maka dari itu, keberadaan

peneliti pada saat di lapangan sangat memberikan peran penting dalam mendukung proses pengumpulan data yang akan dijadikan sebagai data yang paling akurat.

Dalam pelaksanaannya observasi yang dilakukan peneliti selalu dibantu dengan adanya informan pendukung. Hal ini memudahkan peneliti dalam mengamati realitas di lapangan terkait dengan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat. Sehingga pada pelaksanaannya peneliti juga bisa menggali informasi terkait dengan apa yang diamati oleh peneliti kepada informan pendukung yang juga merupakan bagian dari objek yang diamati. Observasi dilakukan pada empat Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Waktu yang dibutuhkan dalam observasi memakan waktu kurang lebih selama 1 jam. Setelah proses observasi selesai, data dideskripsikan dengan menampilkan berbagai data yang ditemukan berdasarkan catatan-rekaman lapangan. Kemudian dilakukan penyusunan, analisis, interpretasi, serta penarikan kesimpulan sehingga menjadi hasil dari output salah satu triangulasi sumber metode yang dapat memberikan dukungan penuh pada hasil penelitian secara keseluruhan.

3.4.3. Studi Dokumentasi

Pemilihan metode ini dilandasi pemikiran bahwa dalam sumber-sumber tertulis tersebut dapat diperoleh ungkapan gagasan, persepsi, pemikiran, dan sikap para pemangku kebijakan dalam satu periode terakhir (lima tahun masa jabatan). Kajian dokumen difokuskan pada aspek materi atau substansi yang ada kaitannya dengan kebijakan olahraga masyarakat yang diterapkan, meliputi; dokumen kebijakan olahraga baik berupa undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan Menteri dan peraturan daerah, rencana pembangunan jangka panjang dan jangka menengah daerah, rencana strategis lembaga terkait pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan peraturan maupun program olahraga masyarakat yang diterapkan di Jawa Barat.

Peneliti dalam penelitian kualitatif bertindak sebagai instrumen utama, oleh karena itu peneliti dapat memanfaatkan sumber-sumber lain berupa catatan dan dokumen (*nonhuman resources*). Menurut Lincoln & Guba, (1985)

mendefinisikan dokumen sebagai bahan tertulis atau rekaman yang tidak disiapkan untuk keperluan evaluasi atau atas permintaan penyelidik. Creswell (2009) menambahkan bahwa istilah 'dokumen' tidak hanya mencakup teks, tetapi juga suara, foto, video, dan materi apa pun yang membawa pesan yang relevan. Guba dan Lincoln mengemukakan bahwa dokumen dapat dibagi menjadi dua kategori utama: catatan publik dan dokumen pribadi. Dalam penelitian ini peneliti akan mengumpulkan data melalui dokumen yang sudah dirancang sebelumnya oleh Dinas Pemuda dan Olahraga, dengan langkah sebagai berikut:

- 1) Mengejar masalah khusus untuk diselidiki;
- 2) Menggunakan proses dan konteks sumber informasi;
- 3) Mencari contoh-contoh dokumen yang relevan, mencatat format khususnya dan memilih unit analisis, misalnya, setiap artikel;
- 4) Membuat daftar beberapa item atau kategori untuk memandu pengumpulan data dan konsep protokol (lembar pengumpulan data).

Studi dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengkonfirmasi dalam rangka pemenuhan triangulasi sumber metode dengan data yang sudah ditemukan dalam teknik pengumpulan data melalui wawancara maupun observasi. Dokumen-dokumen yang dikaji merupakan dokumen yang diklasifikasikan dari mulai dokumen landasan operasional, dokumen perencanaan hingga pada dokumen pelaksanaan dari sistem pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat. Untuk lebih jelasnya terkait dengan macam-macam dokumen yang ditelaah terdapat pada kisi-kisi instrumen pada tabel 3.2, khususnya pada bagian landasan yuridis maupun pada bagian sumber data.

3.5. Validasi Data

Validitas data merupakan suatu kekuatan dalam penelitian kualitatif, tentu validitas ini didapatkan dari penentuan apakah temuan yang didapatkan akurat dari sudut pandang peneliti atau partisipan (Creswell, 2009). Untuk selanjutnya dilakukan verifikasi data guna mengetahui makna data dalam suatu konfigurasi yang secara jelas menunjukkan alur kausalnya, sehingga dapat diajukan proposisi (Ali, 2011). Adapun istilah yang ditetapkan dalam literatur kualitatif yang

mengungkap mengenai empat kriteria yang merupakan tingkat kepercayaan (*Trustworthiness*) suatu penelitian kualitatif yaitu kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*conformability*).

Validasi penelitian bisa saja dilaksanakan secara langsung selama proses penelitian, akan tetapi peneliti juga harus memberikan fokus bahasannya mengenai validasi ini dengan menentukan prosedur validasi secara khusus. Validitas yang dilakukan dalam penelitian kualitatif tentu memiliki prosedur-prosedur tertentu. Hingga pada tahapan terakhir yaitu melakukan pemeriksaan uji keabsahan data atau triangulasi (Ali, 2011). Hal ini merupakan upaya dalam memberikan kesempatan pengecekan kembali kepada setiap pihak atau sumber data (*member check*) guna meningkatkan peluang agar interpretasi temuan penelitian menjadi lebih kredibel. Sehingga data dan hasil riset serta interpretasinya lebih valid dan reliabel. Dengan demikian, peneliti dapat memanfaatkan sumber, teori, metode dalam memeriksa keabsahan data maupun keterhubungan yang paling bermakna (Lexy J. Moleong, 2019; Miles et al., 2013)

3.5.1. Validitas Konstruk (*construct validity*)

Validitas konstruk dapat dicapai dengan menetapkan pengukuran operasional yang benar atas konsep penelitian yang sedang dilakukan dengan tujuan untuk memastikan pemahaman seorang peneliti atas penciptaan kebenaran dan direfleksikan dengan sudut pandang informan. Beberapa cara yang dilakukan untuk meningkatkan validitas konstruk adalah:

- 1) Melakukan triangulasi sumber data yaitu antara informan pemangku kebijakan yang berasal dari Dispora, Ahli (Pakar) Kebijakan olahraga masyarakat, serta pelaksana teknis yang terdiri dari instruktur olahraga masyarakat. Triangulasi sumber data dilakukan dengan memeriksa bukti yang berasal dari sumber-sumber tersebut dan menggunakannya untuk membangun tema-tema secara keseluruhan. Sumber-sumber yang digunakan antara lain hasil wawancara dengan informan berupa rekaman tertulis (transkrip), dokumen-dokumen, artikel ilmiah yang terkait dengan pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat,

serta hasil observasi peneliti yang dibuat dalam bentuk catatan dan dokumen-dokumen tertulis yang ada di lapangan.

- 2) Menetapkan alur keterkaitan dari sumber data. Peneliti membuat catatan keterkaitan antar setiap aktivitas yang dilakukan. Untuk menetapkan alur tersebut peneliti membuat protokol penelitian (kisi-kisi instrumen) yang membantu dan mengarahkan peneliti melakukan keseluruhan aktivitas pengumpulan data (wawancara, studi dokumen dan observasi), penyimpanan data (membuat database hasil wawancara, studi dokumen dan observasi) hingga pengolahan data (*coding data*, analisis data, mencari keterkaitan data, dan proses penulisan laporan penelitian).

Merujuk pada dua cara tersebut, lebih lanjut peneliti berupaya melengkapi triangulasi sumber metode, hal ini untuk menemukan keterkaitan antar setiap metode satu dengan yang lainnya. Selain itu, penelitian juga melakukan feedback antar peneliti dan pembimbing untuk meminimalisir bias antar sesama peneliti. Sehingga baik dari triangulasi sumber data maupun triangulasi sumber metode tercapai kriteria kredibel yang dapat memberikan validitas dari sisi kepercayaan.

3.5.2. Validitas Deskripsi (*description validity*)

Validitas deskripsi yaitu memaparkan dan menyajikan dengan berupa kata-kata yang merupakan hasil dari wawancara maupun observasi, serta studi dokumen. Ancaman terhadap validitas deskripsi ini adalah ketidaktepatan (*inacuracy*) dan ketidaklengkapan (*incompleteness*) data. Untuk mengurangnya, wawancara dengan informan maupun observasi, harus direkam kemudian ditranskripsi agar dapat dilihat ulang. Barangkali wawancara maupun observasi dengan video akan memerlukan biaya lebih besar. Hal ini dapat diganti dengan memiliki catatan lengkap, rinci, dan konkret tentang wawancara maupun observasi dari lapangan (Nuryadi, 2010). Dalam mencapai tingkat kepercayaan (*Trustworthiness*) pada kriteria Transferabilitas (keteralihan) validitas deskripsi selain fokus pada hasil dari wawancara maupun observasi, serta studi dokumen, maka pemilihan informan dan juga lokasi penelitian sangat menentukan. Informan yaitu unsur Pimpinan Dispora yang relevan sebagai pemangku kebijakan baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota;

Tim Pelaksana yang diwakili oleh Instruktur olahraga masyarakat; Para ahli yang diwakili oleh akademisi (Guru Besar) dalam bidang yang relevan dengan kebijakan pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat.

Adapun untuk lokasi penelitian di Jawa Barat pembagian empat wilayah bagian koordinasi yang dilandasi dengan Raihan APMO tertinggi, kelengkapan Lembaga yang tersedia seperti ketersediaan KORMI (Komite Olahraga Masyarakat Indonesia) yaitu wilayah I diwakili oleh Kota Sukabumi, Wilayah II diwakili oleh Kabupaten Karawang, Wilayah III diwakili oleh Kabupaten Indramayu dan Wilayah IV diwakili oleh Kabupaten Bandung. Selanjutnya dalam proses pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi menghabiskan waktu 9 bulan, serta waktu keseluruhan rangkaian penelitian yaitu 12 bulan.

3.5.3. Validitas Internal (*internal validity*)

Menurut Ingleby (2012) validitas internal dapat dicapai ketika peneliti dapat menarik kesimpulan atas permasalahan yang luas. Menurut Creswell (2009) validitas internal menjelaskan bagaimana penelitian ini ditujukan untuk memecahkan masalah. Langkah-langkah dalam validitas internal yaitu menyusun rencana triangulasi, menyusun rencana penerimaan dari informan, dan mengidentifikasi bagaimana informan dan partisipan terlibat dalam setiap tahap penelitian. Dalam mencapai validasi pada kriteria dependabilitas (kebergantungan) melalui validitas internal yaitu fokus pada triangulasi sumber metode yaitu keterkaitan antara data yang dihasilkan melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Serta dilakukannya member checking antar informan, terutama pada informan pemangku kebijakan dan informan pelaksana teknis kebijakan.

Dalam memecahkan permasalahan hingga pada menarik kesimpulan atas permasalahan yang luas dalam validitas internal guna memenuhi kriteria kebergantungan, penelitian ini telah dilakukan dengan dapat menunjukkan bukti-bukti yang berhubungan dengan seluruh rangkaian proses penelitian. Rangkaian penelitian tersebut dimulai dari pengajuan izin penelitian, proses pengambilan data, yang kemudian dianalisis untuk disajikan secara

komprehensif sebagai bukti autentik dalam proses penelitian yang sudah dilaksanakan.

3.5.4. Validitas Eksternal (*external validity*)

Validitas eksternal merupakan keberlanjutan atas penemuan penelitian yang dapat diinterpretasikan melampaui kasus yang digunakan dalam penelitian, dengan tujuan untuk membentuk hasil interpretasi yang unik pada suatu peristiwa/kejadian. Beberapa cara untuk melakukan validitas eksternal adalah menjelaskan deskripsi yang terperinci, lengkap, dan padat sehingga orang akan memahami dan tertarik, membandingkan penemuan penelitian dengan teori yang telah ada. Disamping itu, tentunya perlu dilakukannya konfirmasiabilitas (kepastian) yaitu dengan cara triangulasi sumber antar peneliti. Hal ini dimaksudkan agar peneliti dan juga pembimbing sebagai bagian dari tim penelitian ini bisa meminimalisir bias pemahaman terkait dengan rangkaian penelitian hingga pada penemuan hasil temuan penelitian yang juga berfokus pada membandingkan penemuan penelitian dengan teori yang telah ada.

Dengan adanya konfirmasiabilitas ini tentunya kebenaran yang berkaitan dengan hasil penelitian menjamin tingkat keabsahan datanya. Dengan demikian, hasil temuan penelitian yang telah menunjukkan seluruh rangkaian dan kelengkapan penelitian dapat dianggap sebagai proses dari pelaksanaan pengujian keabsahan data.

Tabel 3.5. Uji Reliabilitas Data Penelitian

| | | |
|--------------------|---|---|
| <i>Credibility</i> | <p>Data Triangulasi</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Pihak Pakar (ahli) ● Pihak Pemangku Kebijakan (Dispora) ● Pihak Pelaksana Teknis (Instruktur Olahraga Masyarakat/KORMI) | <p>Dalam proses triangulasi data dalam penelitian ini, peneliti mengkompilasi beberapa data hasil penelitian berupa hasil wawancara dengan hasil observasi yang berupa transkrip, catatan, dan juga studi dokumen. Hal ini diawali dari mereduksi data penelitian dari hasil wawancara pada informan kunci, kemudian dilanjutkan pada hasil observasi yang didukung dengan informan pendukung dan juga catatan lapangan, serta tentunya foto-foto ketika penelitian dilaksanakan.</p> |
|--------------------|---|---|

Tabel 3.5. Uji Reliabilitas Data Penelitian (Lanjutan)

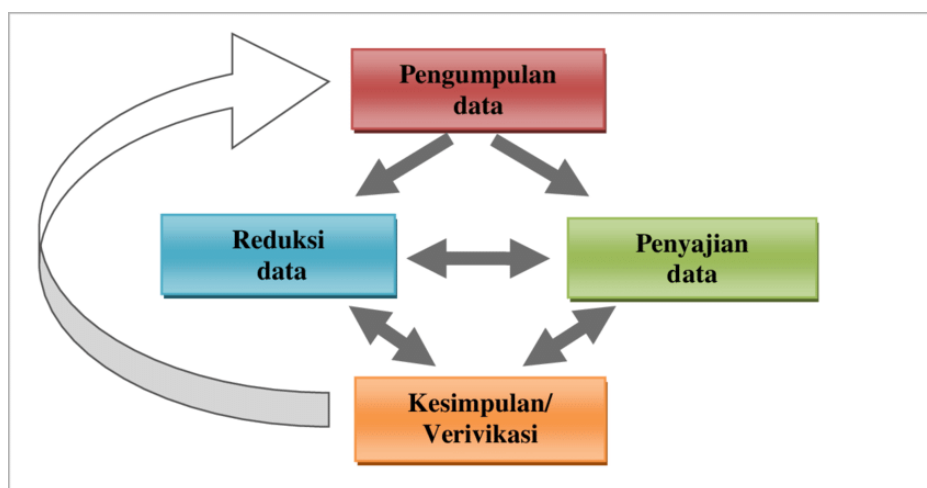
| | | |
|------------------------|--|--|
| <i>Transferability</i> | Deskripsi <ul style="list-style-type: none"> ● Informasi demografi informan ● Deskripsi proses pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat | Informasi demografi dari informan ini berkaitan dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas terkait dengan proses pelaksanaan penelitian ini, yang berupa penggunaan metode penelitian, penentuan informan, pengumpulan data, analisis data hingga pada penyajian data. |
| <i>Dependability</i> | Metode <ul style="list-style-type: none"> ● Wawancara, observasi, dan analisis dokumen ● Transkrip wawancara Member Check ● Ringkasan analisis tematik | Proses ini diawali dari pengajuan permohonan izin penelitian, kemudian proses penelitian hingga pada terkumpulnya data penelitian, yang semuanya disajikan untuk memberikan bukti bahwa proses penelitian telah dilaksanakan, dengan tujuan untuk memastikan validasi temuan, beberapa metode digunakan. Hal ini berarti bahwa informasi wawancara didukung oleh sumber data lain seperti foto, transkrip, catatan peneliti dan dokumen. Selama proses penelitian, peneliti mencatat beberapa catatan yang berkaitan dengan deskripsi pengaturan dan prosedur penelitian, seperti proses sampling, tanggal wawancara, dan catatan informasi yang ditujukan pada informan. Disamping itu, sangat penting bahwa baik data maupun interpretasi yang diperoleh yang selanjutnya diverifikasi oleh informan, dikarenakan temuan secara individual dan kolektif yang dibangun dalam konteks penelitian ini. |
| <i>Confirmability</i> | Triangulasi peneliti Peneliti dan Pembimbing (Tim Promotor) | Mengemukakan persepsi dalam menggambarkan perspektif peneliti dalam memberikan makna pada setiap pengelompokan data dan menerangkan makna dari setiap keterhubungan unit penelitian. Sehingga menghasilkan keterhubungan elemen kunci dari konstruksi pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat yang berkemajuan. Hasil temuan dari |

Tabel 3.5. Uji Reliabilitas Data Penelitian (Lanjutan)

| | | |
|--|---|--|
| | | penelitian ini telah memaparkan fungsi serta proses penelitian yang sudah dilaksanakan, sehingga telah dianggap melakukan uji <i>confirmability</i> . |
| | Triangulasi Teori (temuan penelitian dibandingkan dengan teori relevan) | Mengkaji dan memaparkan hasil kajian temuan penelitian dengan diintegrasikan pada teori yang relevan untuk menghindari bias individual peneliti atas temuan atau kesimpulan yang dihasilkan. Secara khusus bagian ini dikemukakan pada bagian pembahasan penelitian yang mencakup pengkajian yang mendalam dengan didukung teori-teori yang relevan. |

3.6. Analisis Data

Menurut Miles et al., (2013) dalam melakukan pengolahan data dengan menggunakan metode kualitatif dilakukan melalui empat tahapan yang digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3.2. Tahapan Pengolahan Data dalam Metode Kualitatif (Miles & Hubberman)

Berikut ini penjelasan dari masing – masing tahapan yang dimaksud pada gambar di atas:

3.6.1. Tahap Pengumpulan Data

Pada bagian ini dilakukan kegiatan mengklasifikasikan data dan informasi yang diperoleh sesuai dengan variabel dan indikator yang akan diukur,

diuraikan, dan dianalisa. Dengan demikian dalam hal ini dilakukan pengelompokan data dan informasi sesuai dengan hasil wawancara dan pengumpulan data sekunder yang berkaitan dengan kebijakan pengembangan olahraga masyarakat di Jawa Barat.

3.6.2. Tahap Reduksi

Reduksi data yaitu proses pemilihan, perumusan perhatian pada penyederhanaan data bentuk uraian yang terinci dan sistematis, menonjolkan pokok-pokok yang penting agar lebih mudah dikendalikan. Reduksi data merupakan bentuk analisis menajamkan, menggolongkan (dengan menggunakan *coding*), membuang yang tidak perlu sehingga akan memberikan gambaran lebih terarah tentang hasil pengamatan dan juga mempermudah peneliti untuk mencari kembali data itu apabila diperlukan. Reduksi data merupakan langkah awal dalam menganalisa data yang telah terkumpul yang dilakukan dengan cara membuat rangkuman terhadap aspek-aspek permasalahan yang diteliti sehingga memudahkan dalam melakukan langkah-langkah analisis berikutnya.

Pada bagian ini dilakukan kegiatan pemilihan data dan informasi dari informan, baik hasil wawancara maupun dokumentasi yang relevan dengan penerapan kebijakan dalam pengembangan olahraga masyarakat di Jawa Barat. Hasil wawancara diintisarikan sehingga arah jawaban dapat dikelompokkan berdasarkan aspek – aspek yang berkenaan dengan konsepsi pengembangan olahraga menuju pembangunan melalui olahraga.

3.6.3. Tahap Penyajian Data

Penyajian data merupakan upaya untuk melihat gambaran keseluruhan data atau bagian-bagian tertentu dari penelitian yang kesemuanya dirancang untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang terpadu dan mudah dilihat serta dimanfaatkan. Dengan demikian peneliti dapat menguasai data itu dan tidak tenggelam dalam tumpukkan data sehingga setelah diadakan reduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data secara jelas dan singkat. Penyajian data secara jelas dan singkat akan memudahkan dalam memahami gambaran terhadap aspek-aspek yang diteliti baik secara keseluruhan maupun

bagian demi bagian. Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan aspek-aspek yang diteliti dan disusun menurut kelompok dan tema atau dimensi yang menjadi objek penelitian. Penyajian data ini selanjutnya digunakan sebagai bahan untuk menafsirkan data sampai dengan pengambilan kesimpulan.

Dalam rangka menyajikan data penelitian, data – data terpilih selanjutnya disajikan dalam uraian, dengan menyertakan tabel atau grafik yang dianggap mendukung uraian tersebut. Pada bagian ini akan dilakukan penyajian secara narasi atas tindak lanjut prosedur kedua yang berpedoman kepada teori implementasi kebijakan publik dengan maksud untuk mempertajam analisa dan menjelaskan interaksi antar variabel yang diteliti dan hasil pendeskripsian pada tahap kedua. Sehingga pada bagian ini dapat diperoleh suatu jawaban sejumlah pertanyaan terkait dengan pelaksanaan kebijakan olahraga masyarakat di Jawa Barat.

3.6.4. Tahap Pengambilan kesimpulan

Pengambilan kesimpulan dan verifikasi yaitu upaya untuk mencari makna dari data yang dikumpulkan dengan mencari pola, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering timbul sampai pada tahap mencoba mengambil kesimpulan. Kesimpulan ini merupakan jawaban atas permasalahan yang ingin dikaji sebagaimana dijelaskan pada identifikasi dan perumusan masalah penelitian.